



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

2024

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
- NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
- LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**

AUDITED

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

- **Laporan Realisasi Anggaran – Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023**
- **Laporan Operasional - Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023**
- **Laporan Perubahan Ekuitas - Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023**
- **Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023**
- **Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)**



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*Unaudited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00
5	BELANJA DAERAH	10.189.649.650,00	9.075.929.480,00	89,07	6.751.212.895,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.890.345.550,00	8.784.582.680,00	88,82	6.283.155.495,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.519.736.004,00	3.065.548.777,00	87,10	2.653.188.195,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.370.609.546,00	5.719.033.903,00	89,77	3.629.967.300,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.890.345.550,00	8.784.582.680,00	88,82	6.283.155.495,00
5.2	BELANJA MODAL	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34	468.057.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34	466.557.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34	468.057.400,00
	JUMLAH BELANJA	10.189.649.650,00	9.075.929.480,00	89,07	6.751.212.895,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.189.649.650,00)	(9.075.929.480,00)	89,07	(6.201.986.579,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Kuala Pembuang, 13 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian,

dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
NIP. 19770222200604 1 012



KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN	149.100,00	118.000,00
3	EKUITAS	2.215.162.645,00	2.273.271.625,00
3.1	EKUITAS	2.215.162.645,00	2.273.271.625,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.075.929.480,00	6.201.986.579,00
	JUMLAH EKUITAS	2.215.162.645,00	2.273.271.625,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.215.311.745,00	2.273.389.625,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Kuala Pembuang, 13 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian,



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
NIP. 19770222 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN OPERASIONAL (*Unaudited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
8	BEBAN	9.155.317.030,00	6.847.979.081,00	2.307.337.949,00	33,69
8.1	BEBAN OPERASI	8.778.485.280,00	6.393.376.947,00	2.385.108.333,00	37,31
8.1.01	Beban Pegawai	3.065.548.777,00	2.653.188.195,00	412.360.582,00	15,54
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.712.936.503,00	3.740.188.752,00	1.972.747.751,00	52,74
	JUMLAH BEBAN OPERASI	8.778.485.280,00	6.393.376.947,00	2.385.108.333,00	37,31
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	376.831.750,00	454.602.134,00	(77.770.384,00)	(17,11)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	312.972.952,00	390.743.336,00	(77.770.384,00)	(19,90)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.659.298,00	19.659.298,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.199.500,00	44.199.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	376.831.750,00	454.602.134,00	(77.770.384,00)	(17,11)
	JUMLAH BEBAN	9.155.317.030,00	6.847.979.081,00	2.307.337.949,00	33,69
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00)	(2.856.564.265,00)	45,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Kuala Pembuang, 13 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian,



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
NIP. 19770222 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (*Unaudited /Audited*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.273.271.625,00	2.370.037.811,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00)
RK PPKD	9.075.929.480,00	6.201.986.579,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	21.278.570,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.215.162.645,00	2.273.271.625,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian,



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
NIP. 19770222 200604 1 012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 (per 31 Desember 2024) telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah dan kinerja Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Kuala Pembuang, 13 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian,



dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19770222 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Mohammad Hatta - Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74212)

SMS Center : 0821 4400 4400 Email : diskominfo@seruyankab.go.id

Website : diskominfo.seruyankab.go.id.

KALIMANTAN TENGAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Pembuang, 13 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P

Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19770222 200604 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
NERACA	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	
LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN	
LAPORAN KEUANGAN	2
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS	
LAPORAN KEUANGAN	4
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	5
2.1.1 REALISASI APBD TA.2024.....	5
2.1.2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN DAERAH.....	6
2.1.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BELANJA DAERAH.....	7
2.1.4 IKHTISAR TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN	
PERPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 ...	8
2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN FISIK BELANJA TAHUN 2024	11
2.3 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET	
YANG TELAH DI TETAPKAN	12
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
3.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	13
3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN	
KEUANGAN	13
3.2.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	14
3.2.2 NERACA	14
3.2.2.1 ASET	15
3.2.2.2 KEWAJIBAN	15
3.2.2.3 EKUITAS	16
3.2.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)	16
3.2.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	16
3.2.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CLAK)	16

3.3	BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	17
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
4.1	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN...	18
4.1.1	PENDAPATAN-LRA	18
4.1.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	19
4.1.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	20
4.1.1.3	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	21
4.1.2	BELANJA	23
4.1.2.1	BELANJA OPERASI	23
4.1.2.1.1	BELANJA PEGAWAI	24
4.1.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27
4.1.2.3	BELANJA HIBAH	29
4.1.2.4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	30
4.1.2.5	BELANJA MODAL	31
4.1.3	SURPLUS/DEFISIT LRA	33
4.2	PENJELASAN POS-POS NERACA	33
4.2.1	ASET	33
4.2.1.1	ASET LANCAR	33
4.2.1.1.1	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN ...	34
4.2.1.1.2	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN .	35
4.2.1.1.3	KAS LAINNYA	35
4.2.1.1.4	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	35
4.2.1.1.5	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	36
4.2.1.1.6	PERSEDIAN	36
4.2.1.2	ASET TETAP	37
4.2.1.2.1	TANAH	38
4.2.1.2.2	PERALATAN DAN MESIN	38
4.2.1.2.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	39
4.2.1.2.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40
4.2.1.2.5	ASET TETAP LAINNYA	40
4.2.1.2.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan ...	41
4.2.1.2.7	AKUMULASI PENYUSUTAN	41
4.2.1.3	ASET LAINNYA	41
4.2.1.3.1	ASET TIDAK BERWUJUD	42
4.2.1.3.2	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	42
4.2.2.	KEWAJIBAN	42

4.3	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	45
4.3.1	PENDAPATAN-LO	45
4.3.2	BEBAN- LO	48
4.3.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL	48
4.3.4	POS TAK TERDUGA	49
4.3.5	SURPLUS/ DEFISIT LO	49
4.4	PENJELASAN POS-POS PERUBAHAN EKUITAS.....	50
4.4.1	EKUITAS AWAL	50
4.4.2	SURPLUS / (DEFISIT) LO	50
4.4.3	EKUITAS AKHIR	
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	
5.1	GAMBARAN ORGANISASI.....	52
5.2	STRUKTUR ORGANISASI.....	52
5.3	TUGAS POKOK DAN FUNGSI	52
5.4	SUMBER DAYA MANUSIA.....	56
5.5	ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA SKPD	58
5.6	INDIKATOR KINERJA	58
5.7	PROGRAM/KEGIATAN.....	59
BAB VI	PENUTUP	62
 LAMPIRAN - LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024.

Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024.

Tujuan penyusunan LKPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 yaitu antara lain untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2020 Nomor 34, Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 27);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 54);
- r. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 26);
- s. Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Peraturan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 70);
- u. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 22 Tahun 2024);
- v. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 26 Tahun 2024).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (Untuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian)

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

Bab II. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan;

Bab III. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan;
2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. **Laporan Realisasi Anggaran**
 1. Pendapatan LRA;
 2. Belanja LRA;
2. **Neraca**
 1. Aset;
 2. Kewajiban;
 3. Ekuitas Dana;
3. **Laporan Operasional**
 1. Pendapatan LO;
 2. Beban LO;
 3. Kegiatan Non Operasional;
 4. Surplus / Defisit-LO;
4. **Laporan Perubahan Ekuitas**
 1. Ekuitas Awal;
 2. Surplus/(Defisit) LO;
 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan;
 4. Ekuitas Akhir

Bab V. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VI. Penutup

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tergambar pada pencapaian / realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2024.

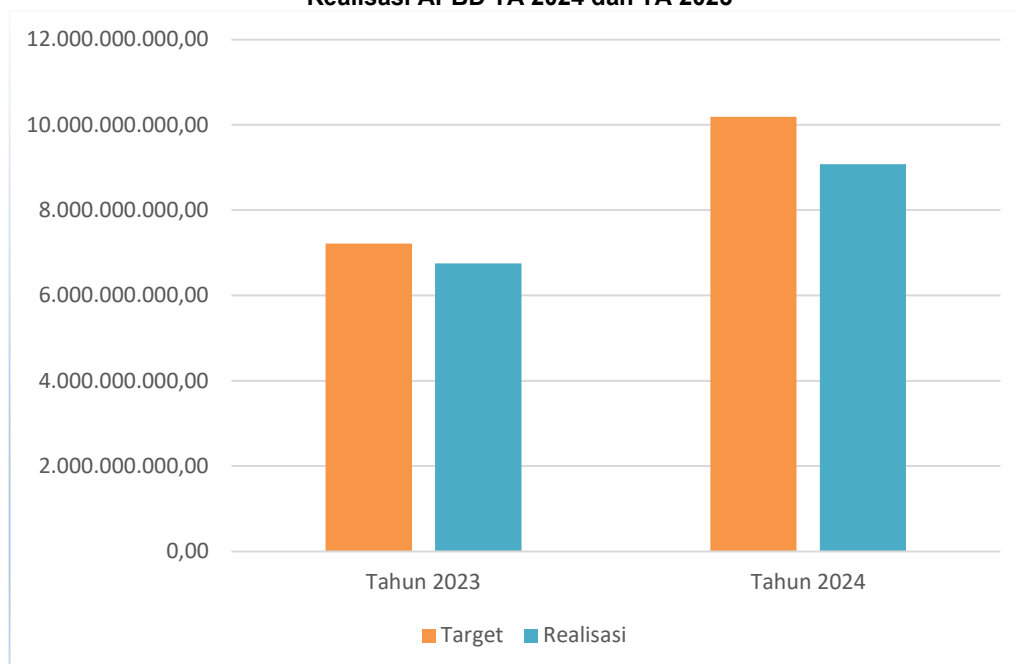
Tabel 2.1
Realisasi APBD TA 2024

No.	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00
2	Belanja Daerah	10.189.649.650,00	9.075.929.480,00	89,07	6.751.212.895,00
3	Surplus/Defisit	(10.189.649.650,00)	(9.075.929.480,00)	89,07	(6.201.986.579,00)

2.1.1 Realisasi APBD TA 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSandi) tidak memiliki target Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk realisasi belanja pada DiskominfoSandi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 9.075.929.480,00 dengan target belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 10.189.649.650,00 dan nilai realisasi persentase sebesar 89,07%. Peningkatan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Realisasi APBD TA 2024 dan TA 2023



2.1.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

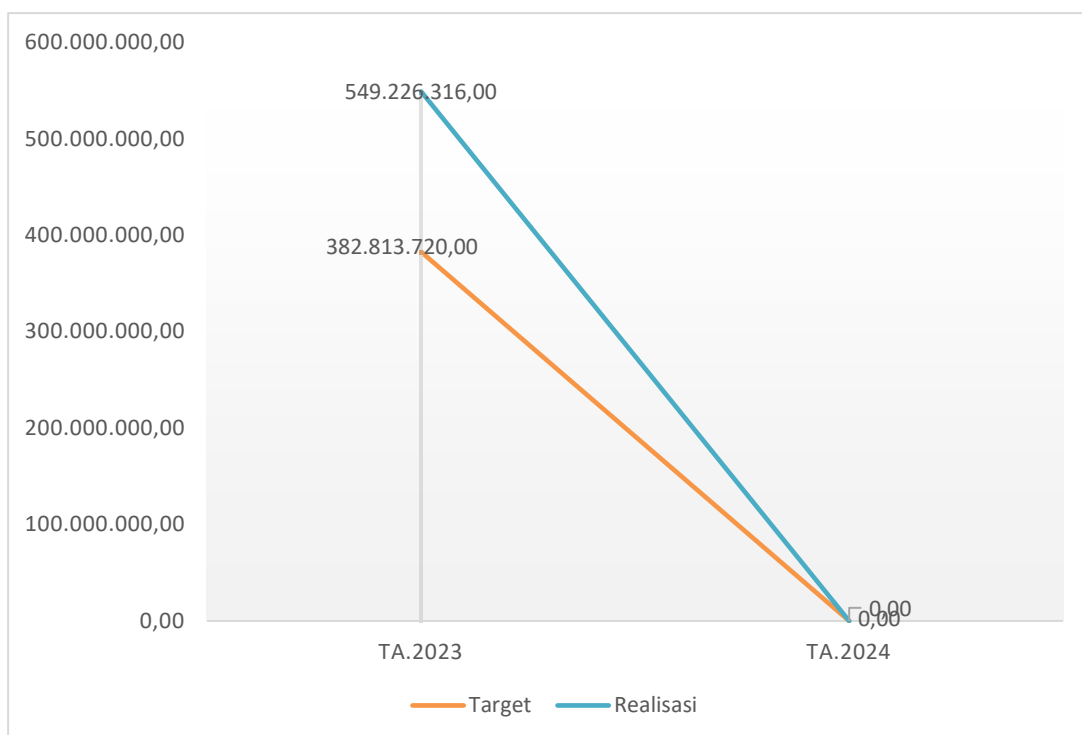
Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi) tidak memiliki target Pendapatan Daerah. Sehingga tidak memiliki target dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan TA 2024

No.	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak ada jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena ditetapkannya peraturan yang menghapus kewenangan Diskominfosandi sebagai Perangkat Daerah yang dapat melakukan pemungutan retribusi menara telekomunikasi, penurunan pendapatan tahun anggaran 2024 dapat kita lihat sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.2
Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023



2.1.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

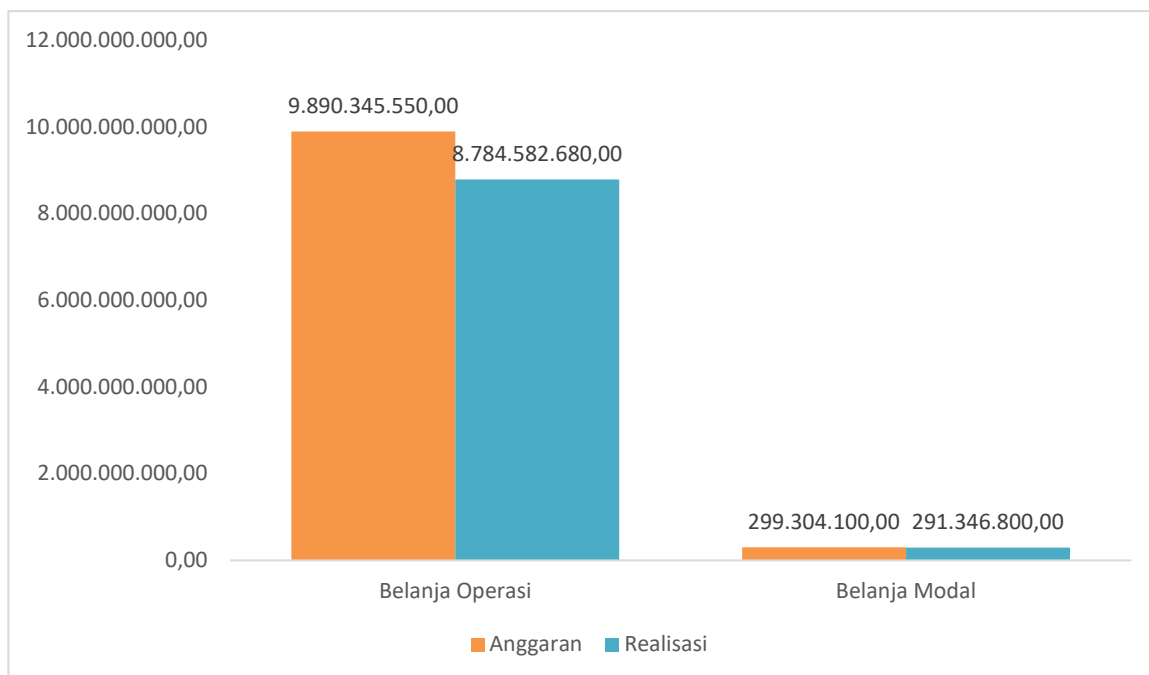
Anggaran Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.189.649.650,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 9.075.929.480,00 atau 89,07%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024

NO	JENIS BELANJA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	10.189.649.650,00	9.075.929.480,00	89,07
1	BELANJA OPERASI	9.890.345.550,00	8.784.582.680,00	88,82
	Belanja Pegawai	3.519.736.004,00	3.065.548.777,00	87,10
	Belanja Barang dan Jasa	6.370.609.546,00	5.719.033.903,00	89,77
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34
	JUMLAH	10.189.649.650,00	9.075.929.480,00	89,07

Pencapaian kinerja belanja daerah, dapat dilihat pada masing-masing jenis belanja pada grafik dibawah ini dimana Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 9.890.345.550,00 mencapai realisasi sebesar Rp. 8.784.582.680,00 atau sebesar 88,82%. Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesing yang dianggarkan sebesar Rp. 299.304.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 291.346.800,00 atau sebesar 97,34%. Kenaikan dan penurunan kinerja belanja Diskominfosandi dapat kita baca pada laju grafik dibawah ini:

Grafik 2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024



2.1.4 Ikhtisar Target dan Realisasi Pelaksanaan per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024

Alokasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 10.189.649.650,00 yang terbagi dalam berbagai program dan kegiatan terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.890.345.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.784.582.680,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 299.304.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 291.346.800,00. Pada Tahun 2024 target dan realisasi belanja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan dengan rincian sebagai berikut ::

Tabel 2.4
Rincian Target dan Realisasi Belanja DiskominfoSandi TA 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.071.664.510	5.252.103.340	86,50
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	8.250.000	8.250.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.750.000	3.750.000	100,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.369.064.004	2.938.951.777	87,23
	Penyedia Gaji dan Tunjangan PNS	3.363.904.004	2.933.791.777	87,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.160.000	2.160.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.152.000	206.205.700	92,41
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	75.000.000	70.171.000	93,56
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	10.000.000	4.210.000	42,10
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	138.152.000	131.824.700	95,42
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.406.507.800	1.336.699.157	95,04
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.635.000	3.635.000	100,00
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328.020.800	318.993.100	97,25
	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	3.293.500	3.292.500	99,97
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	75.007.500	73.143.250	97,51

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.250.000	9.250.000	100,00
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.080.000	10.052.000	99,72
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	977.221.000	918.333.307	93,97
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.915.306	576.501.406	66,89
	Penyedia Jasa Surat Penyurat	8.536.000	8.536.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	76.685.136	69.217.916	90,26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	776.694.170	498.747.490	64,21
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.775.400	185.495.300	91,48
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	179.145.400	161.865.300	90,35
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.630.000	23.630.000	100,00
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.288.366.600	1.255.774.550	97,47
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.288.366.600	1.255.774.550	97,47
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	62.900.000	51.006.000	81,09
	Pengelolaan media komunikasi public	1.125.725.000	1.122.695.250	99,73
	Pelayanan Informasi Pubik	49.741.800	42.342.800	85,13
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	49.999.800	39.730.500	79,46
3.	PROGRAM PENGELOLA APLIKASI INFORMATIKA	2.729.412.000	2.483.905.190	91,01
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.472.349.000	2.331.182.890	94,29
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.420.000	2.420.000	100,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.469.929.000	2.328.762.890	94,28
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	257.063.000	152.722.300	59,41
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	51.758.900	21.322.900	41,20
	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	150.032.000	76.129.400	50,74

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
	Pengembangan dan Pengelola Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	55.272.100	55.270.000	100,00
URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN STATISTIK				
4.	PROGRAM PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL	50.000.000	48.546.500	97,09
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	48.546.500	97,09
	Koordinasi, Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.665.000	19.575.000	99,54
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	30.335.000	28.971.500	95,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
5.	PROGRAM PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	50.206.540	36.187.400	72,08
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	29.972.800	22.847.400	76,23
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.974.000	8.874.000	59,26
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	14.998.800	13.973.400	93,16
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20.233.740	13.340.000	65,93
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.233.740	13.340.000	65,93
PAGU TOTAL		10.189.649.650	9.076.516.980	89,08

Dari alokasi anggaran belanja yang telah ditetapkan, capaian realisasi yang berhasil dicapai selama tahun anggaran 2024 adalah Rp 9.076.516.980,00 atau 89,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.189.649.650,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.751.212.895,00 atau 93,57% maka realisasi tahun anggaran 2024 mengalami penurunan yakni dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Realisasi Belanja DiskominfoSandi TA 2024 dan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2024 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	Penurunan/ kurang/tambah (Rp)
5.1	Belanja Operasi	8.784.582.680,00	6.283.155.495,00	2.501.427.185,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.065.548.777,00	2.653.188.195,00	412.360.582,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.719.033.903,00	3.629.967.300,00	2.089.066.603,00
5.2	Belanja Modal	291.346.800,00	468.057.400,00	-176.710.600,00
5.2.02	Peralatan dan Mesin	291.346.800,00	466.557.400,00	-175.210.600,00
5.2.05	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		9.075.929.480,00	6.751.212.895,00	2.324.716.585,00

2.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN FISIK BELANJA TAHUN

Tabel 2.6
Rincian Realisasi Belanja DiskominfoSandi TA 2024 dan TA 2023

No	Nama SOPD	Pagu APBD Murni	Belanja Operasi				Belanja Modal				Realisasi Keuangan APBD		
			Pagu Belanja Operasi	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Pagu Belanja Modal	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	%	%		Rp	%	%	Rp	%	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	21	22	23
	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	10.189.649.650	9.890.345.550	8.785.170.180	88,83	88,83	299.304.100	291.346.800	97,34	97,34	9.076.516.980	89,08	89,08
TOTAL				8.785.170.180	88,83	88,83	299.304.100	291.346.800	97,34	97,34	9.076.516.980	89,08	89,08

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan maupun penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

1. Pembatasan proses penerbitan SPD dikarenakan Anggaran pada Kas Daerah tidak tersedia sehingga proses penyerapan anggaran tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan Surat Sekretariat Daerah tentang batasan anggaran yang disediakan untuk masing masing SKPD.
2. Untuk kelengkapan pencairan sering terkendala persyaratan-persyaratan seperti Berita Acara Rekonsiliasi SP2D, Berita Acara Rekonsiliasi SPJ, Berita Acara Rekonsiliasi Aset, dimana semua berita acara tersebut memerlukan waktu dalam kepengurusannya yang lama.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah pedoman atau ketentuan yang dipilih berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD. Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Seruyan dan sekaligus sebagai bahan untuk dikompilasi/dikonsolidasikan menjadi Entitas Pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SOPD sebagai entitas akuntansi adalah.

- 1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2.Neraca;
- 3.Laporan Operasional;
- 4.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 5.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO dan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Dan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.

3.2.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3.2.2.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Seruyan, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi Aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

3.2.2.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Seruyan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seruyan atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3.2.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.2.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
10.189.649.650,00	7.219.129.474,00

4.1.1 Pendapatan - LRA

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun tidak memiliki target anggaran pendapatan, sehingga tidak memiliki realisasi anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp. 549.226.316,00, maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 549.226.316,00. Pendapatan Kabupaten Seruyan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Perimbangan, dan Lain-lain PAD Yang Sah. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan – LRA

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Kenaikan/
	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)	Penurunan
Pendapatan Asli Daerah	382.813.720,00	549.226.316,00	143,47	0,00	(549.226.316,00)
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	382.813.720,00	549.226.316,00	143,47	0,00	(549.226.316,00)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	549.226.316,00

Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun tidak memiliki target anggaran pendapatan, sehingga tidak memiliki realisasi anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp. 549.226.316,00, maka realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 549.226.316,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)		Tahun 2023 (Rp)	
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	(100,00)	549.226.316,00	(549.226.316,00)
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	(100,00)	549.226.316,00	(549.226.316,00)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	382.813.720,00

4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki realisasi Pendapatan Pajak Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Penginapan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Makan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Boga/ Katering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklame Bersinar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan sumber lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral bukan logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 549.226.316,00,- atau 143,47% dari anggaran Rp 382.813.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp 0,00, maka realisasi TA 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp. (549.226.316,00).

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Alat dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)
Jumlah	382.813.720,00	549.226.316,00	0,00%	549.226.316,00	(549.226.316,00)

4.1.1.3. Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp.0,00 maka tidak ada realisasi pada TA 2024.

Tabel 4.6
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan
Tunjangan					
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.075.929.480,00 atau 89,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.189.649.650,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2023 sebesar Rp. 6.751.212.895,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.324.716.585,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rincian Belanja

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Operasi	9.890.345.550,00	8.784.582.680,00	88,82	6.283.155.495,00	2.501.427.185,00
Belanja Modal	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34	468.057.400,00	(176.710.600,00)
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.189.649.650,00	9.075.929.480,00	89,07	6.751.212.895,00	2.324.716.585,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
9.075.929.480,00	6.751.212.895,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.784.582.680,00 atau 88,823% dari anggaran Rp. 9.890.345.550,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp. 6.283.155.495,00 maka

realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.501.427.185,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Belanja Operasi

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Pegawai	3.519.736.004,00	3.065.548.777,00	87,10	2.653.188.195,00	412.360.582,00
Belanja Barang dan Jasa	6.370.609.546,00	5.719.033.903,00	89,77	3.629.967.300,00	2.089.066.603,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.890.345.550,00	8.784.582.680,00	88,82	6.283.155.495,00	2.501.427.185,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.065.548.777,00 atau 87,10% dari anggaran Rp. 3.519.736.004,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 2.653.188.195,00 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 412.360.582,00. Anggaran dan realisasi belanja pegawai Diskominfo Seruyan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Belanja Pegawai

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.777.690,00	1.625.444.253,00	80,36	1.530.637.322,00	94.806.931,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.318.626.314,00	1.285.847.524,00	97,51	987.295.873,00	298.551.651,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.332.000,00	154.257.000,00	86,50	135.255.000,00	19.002.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	0,00
Honorarium PNS	-	-	-	-	0,00
Honorarium Non PNS	-	-	-	-	0,00
Uang Lembur	-	-	-	-	0,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-	-	-	-	0,00
Belanja Pegawai BOS APBN	-	-	-	-	0,00
	3.519.736.004,00	3.065.548.777,00	87,10	2.653.188.195,00	412.360.582,00

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Rincian Belanja Pegawai

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024 (RP)	REALISASI 2024 (RP)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	3.519.736.004,00	3.065.548.777,00	87,10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.777.690,00	1.625.444.253,00	80,36
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.236.342.161,00	1.124.051.997,00	90,92
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.033.252.161,00	1.008.722.397,00	97,63
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	203.090.000,00	115.329.600,00	56,79
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	164.476.908,00	122.422.386,00	74,43
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.113.296,00	122.422.386,00	87,37
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	24.363.612,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.880.000,00	110.590.000,00	92,25
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.880.000,00	110.590.000,00	92,25
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.931.000,00	73.736.000,00	63,06
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	93.221.000,00	54.296.000,00	58,24
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23.710.000,00	19.440.000,00	81,99
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.490.000,00	20.935.000,00	60,70
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.170.000,00	20.935.000,00	98,89
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.320.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	103.600.000,00	71.261.280,00	68,79
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.000.000,00	68.654.160,00	83,72
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.600.000,00	2.607.120,00	12,07
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	107.497.917,00	2.549.747,00	2,37
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86.617.917,00	2.549.747,00	2,94
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	20.880.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	828.458,00	12.517,00	1,51
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	108.458,00	11.141,00	10,27
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	720.000,00	1.376,00	0,19
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	118.800.000,00	90.713.373,00	76,36
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	104.400.000,00	83.738.989,00	80,21
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	14.400.000,00	6.974.384,00	48,43

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.800.000,00	2.292.985,00	39,53
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.200.000,00	2.046.937,00	93,04
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.600.000,00	246.048,00	6,83
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	14.131.246,00	6.878.968,00	48,68
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.471.208,00	6.140.856,00	64,84
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	4.660.038,00	738.112,00	15,84
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.318.626.314,00	1.285.847.524,00	97,51
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	502.076.790,00	491.563.044,00	97,91
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	475.721.131,00	466.513.517,00	98,06
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	26.355.659,00	25.049.527,00	95,04
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	25.321.195,00	17.521.195,00	69,20
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	17.521.195,00	17.521.195,00	100,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	7.800.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	791.228.329,00	776.763.285,00	98,17
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	750.797.988,00	740.235.762,00	98,59
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	40.430.341,00	36.527.523,00	90,35
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	178.332.000,00	154.257.000,00	86,50
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	155.832.000,00	131.757.000,00	84,55
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.832.000,00	131.757.000,00	84,55
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
JUMLAH		3.519.736.004,00	3.065.548.777,00	87,10

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.519.736.004,00	2.886.086.302,00

4.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.719.033.903,00 atau 89,77% dari anggaran Rp. 6.370.609.546,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp. 3.629.967.300,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.089.066.603,00. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 4.12
Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Barang	519.094.660,00	500.195.650,00	96,36	476.803.920,00	23.391.730,00
Belanja Jasa	4.591.353.946,00	4.077.941.846,00	88,82	2.073.041.506,00	2.004.900.340,00
Belanja Pemeliharaan	109.210.000,00	102.920.000,00	94,24	109.077.000,00	-6.157.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.150.950.940,00	1.037.976.407,00	90,18	971.044.874,00	66.931.533,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.370.609.546,00	5.719.033.903,00	89,77	3.629.967.300,00	2.089.066.603,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Rincian Belanja Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.370.609.546,00	5.719.033.903,00	89,77
5.1.02.01	Belanja Barang	519.094.660,00	500.195.650,00	96,36
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	510.094.660,00	492.286.150,00	96,51
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81.365.400,00	77.662.000,00	95,45
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.892.300,00	34.409.950,00	98,62
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.624.500,00	31.624.500,00	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	133.213.500,00	128.000.350,00	96,09
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.536.000,00	8.536.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	66.000,00	66.000,00	100,00

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.635.000,00	3.635.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.287.800,00	13.286.800,00	99,99
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	360,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.176.350,00	32.167.600,00	99,97
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.102.300,00	71.031.800,00	97,17
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.490.150,00	16.990.150,00	91,89
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	30.000.000,00	28.082.500,00	93,61
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	45.000.000,00	42.088.500,00	93,53
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.000.000,00	7.909.500,00	87,88
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.000.000,00	7.909.500,00	87,88
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.591.353.946,00	4.077.941.846,00	88,82
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.400.939.776,00	3.938.651.356,00	89,50
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55.621.000,00	37.960.000,00	68,25
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	254.100.000,00	205.050.000,00	80,70
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	66.000.000,00	61.600.000,00	93,33
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.200.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	216.000.000,00	54.000.000,00	25,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.949.400,00	1.258.685,00	64,57
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	74.735.376,00	67.959.231,00	90,93
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.135.805.000,00	1.132.747.250,00	99,73
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.469.929.000,00	2.328.762.890,00	94,28
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.200.000,00	4.913.300,00	40,27
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.162.170,00	1.940.490,00	31,49
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.577.066,00	862.440,00	54,69
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.585.104,00	1.078.050,00	23,51
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	101.202.000,00	63.420.000,00	62,67
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	101.202.000,00	63.420.000,00	62,67
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	80.650.000,00	73.930.000,00	91,67
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	73.930.000,00	98,57
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	5.650.000,00	0,00	0,00

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SERUYAN
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	109.210.000,00	102.920.000,00	94,24
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.210.000,00	102.920.000,00	94,24
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.990.000,00	37.300.000,00	95,67
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.290.000,00	33.820.000,00	88,33
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.300.000,00	8.170.000,00	98,43
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.930.000,00	7.930.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.490.000,00	9.490.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.210.000,00	6.210.000,00	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.950.940,00	1.037.976.407,00	90,18
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.150.950.940,00	1.037.976.407,00	90,18
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.033.067.940,00	982.964.203,00	95,15
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.423.000,00	51.357.204,00	46,09
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.460.000,00	3.655.000,00	56,58
	Jumlah	6.370.609.546,00	5.719.033.903,00	89,77

31 Desember 2024	31 Desember 2023
5.719.033.903,00	3.629.967.300,00

4.1.2.3. Belanja Hibah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki anggaran untuk belanja hibah sehingga tidak memiliki realisasi belanja hibah. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA. 2023 sebesar Rp. 0,00, maka tidak ada realisasi TA. 2024. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.14
Belanja Hibah

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Rincian Belanja Hibah

Kode	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5.1.5.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.5.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.5.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.1.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Jika dibandingkan dengan

realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp.0,00, maka tidak ada realisasi TA 2024. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.16
Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Penerima Bantuan Sosial TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Kode	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.6.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
5.1.6.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
5.1.6.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.1.2.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 291.346.800,00 atau 97,34% dari anggaran Rp. 299.304.100,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp. 468.057.400,00 maka realisasi TA 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp. (176.710.600,00). Anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.18
Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN 2024 (RP)	REALISASI 2024 (RP)	%	REALISASI 2023 (RP)	KENAIKAN/ PENURUNAN
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34	466.557.400,00	(176.710.600,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belangas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34	466.557.400,00	(176.710.600,00)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.19
Rincian Belanja Modal

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2024 (RP)	REALISASI 2024 (RP)	%
5.2	BELANJA MODAL	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	279.054.100,00	271.096.800,00	97,15
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	279.054.100,00	271.096.800,00	97,15
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	299.304.100,00	291.346.800,00	97,34

31 Desember 2024	31 Desember 2023
291.346.800,00	466.557.400,00

4.1.3. Surplus/Defisit LRA

Surplus/defisit-LRA Terdapat selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama tahun 2024 sejumlah: Rp. (9.075.929.480,00) Jika dibandingkan dengan surplus/defisit-LRA tahun 2023 sebesar Rp. (6.201.986.579,00) terdapat Kenaikan sebesar Rp. (2.873.942.901,00).

4.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta dan aset sebesar Rp. 2.215.311.745,00, Kewajiban sebesar Rp. 149.100,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 2.215.162.645,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.215.311.745,00	2.273.389.625,00

4.2.1 ASET

Total saldo Aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 2.215.311.745,00 dan Rp. 2.273.389.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.20
Rincian Aset

Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Aset Lancar	710.000,00	2.241.000,00	(1.531.000,00)	(68,32)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	2.213.687.495,00	2.271.148.625,00	(57.461.130,00)	(2,53)
Aset Lainnya	914.250,00	0,00	914.250,00	0,00
Jumlah	2.215.311.745,00	2.273.389.625,00	(58.077.880,00)	(2,55)

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp. 58.077.880,00 atau (2,55)%.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.215.311.745,00	2.273.389.625,00

4.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan Aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 710.000,00 dan Rp. 2.241.000,00

Tabel 4.21
Rincian Aset Lancar

Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Aset	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	710.000,00	2.241.000,00	(1.531.000,00)	(68,32)
Jumlah	710.000,00	2.241.000,00	(1.531.000,00)	(68,32)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
710.000,00	2.241.000,00

Saldo Aset lancar pada Tahun 2024 sebesar Rp. 710.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 1.531.000,00 atau 68,32% dari tahun 2023 sebesar Rp. 2.241.000,00 terdiri dari:

Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 4.22
Kas dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.1.1.3 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Ada penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. Kas Lainnya per 31 Desember 2023.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Piutang Pendapatan Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. Ada kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23
Piutang Pendapatan Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Seruyan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.24
Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

4.2.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.1.1.14. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 710.000,00 dan Rp. 2.241.000,00 merupakan nilai saldo persediaan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Rincian jenis Persediaan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.25
Persediaan

No	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2024	Persediaan per 31 Des 2023	Kenaikan/Penurunan	%
	BARANG PAKAI HABIS	710.000,00	2.241.000,00	(1.531.000)	(68,32)
1	Bahan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	710.000,00	2.241.000,00	(1.531.000)	(68,32)
4	Obat Obatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga – Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Natura dan Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Persediaan Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARANG TAK HABIS PAKAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Komponen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pipa	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARANG BEKAS PAKAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		710.000,00	2.241.000,00	(1.531.000)	(68,32)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
710.000,00	2.241.000,00

4.2.1.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 2.213.687.495,00 dan Rp. 2.271.148.625,00 merupakan saldo aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.26
Rincian Aset Tetap

No	JENIS ASET	Saldo		Kenaikan/ Penurunan	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023		
1	Tanah	4.514.000,00	4.514.000,00	0,00	0
2	Peralatan dan Mesin	3.636.195.094,00	3.561.453.234,00	74.741.860,00	2,10
3	Gedung dan Bangunan	982.964.900,00	982.964.900,00	0,00	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	441.995.000,00	441.995.000,00	0,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	442.100.000,00	442.100.000,00	0,00	
7	Akumulasi Penyusutan	(3.295.581.499,00)	(3.163.378.509,00)	(132.202.990,00)	4,18
Jumlah		2.213.687.495,00	2.271.148.625,00	(57.461.130,00)	(2,53)

Dari tabel diatas aset tetap mengalami Penurunan sebesar Rp. 57.461.130,00 atau 2,53%. Nilai buku aset tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.213.687.495,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.27
Nilai Buku Aset Tetap

No	JENIS ASET	Saldo	Penyusutan	Nilai Buku
		31 Desember 2024	31 Desember 2024	
1	Tanah	4.514.000,00	0,00	4.514.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.636.195.094,00	2.746.170.292,00	890.024.802,00
3	Gedung dan Bangunan	982.964.900,00	250.379.207,00	732.585.693,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	441.995.000,00	299.032.000,00	142.963.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	0	1.500.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	442.100.000,00	0	442.100.000,00
Jumlah		Rp5.509.268.994	3.295.581.499,00	2.213.687.495,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.213.687.495,00	2.271.148.625,00

4.2.1.2.1. Tanah

Saldo Tanah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 4.514.000,00 dan Rp. 4.514.000,00 maka aset tidak ada kenaikan maupun penurunan. Rincian penambahan dan pengurangan saldo aset tanah sebagai berikut:

Tabel 4.28
Rincian Mutasi Tanah

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		4.514.000,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2022	0,00	
	Hibah	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		4.514.000,00

Saldo aset Tanah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.514.000,00 yang berasal dari Penambahan Aset Tanah berupa hibah sebesar Rp. 2.344.000,00, Reklasifikasi aset KIB D sebesar Rp. 0,00 dan pengurangan yang berasal dari penghapusan aset tanah sebesar Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
4.514.000,00	4.514.000,00

4.2.1.2.2. Peralatan Dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 3.636.195.094,00 dan Rp. 3.561.453.234,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 74.741.860,00 atau 0,97% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		3.561.453.234,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2024	299.006.300,00	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	33.100.000,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Jumlah Pertambahan		332.106.300,00

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penulusuran dan sebab Lainnya	257.364.440,00	
	Jumlah Pengurangan		257.364.440,00
4	Saldo Akhir		3.636.195.094,00

Terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 332.106.300,00 terdiri dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 299.006.300,00 dan Pindah antar SKPD sebesar Rp. 33.100.000,00.

Pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 257.364.440,00 terdiri dari Aset Kondisi Rusak Berat, Dalam Penulusuran dan sebab Lainnya sebesar Rp. 257.364.440,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
3.636.195.094,00	3.561.453.234,00

4.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 982.964.900,00 dan 982.964.900,00 Tidak mengalami kenaikan/Penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 4.30
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		982.964.900,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2021	0,00	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		982.964.900,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
982.964.900,00	982.964.900,00

4.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar 441.995.000,00 dan 441.995.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 4.31
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		441.995.000,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2021	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		441.995.000,00

4.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 1.500.000,00 dan Rp. 1.500.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan, dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

4.32
Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		1.500.000,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2021	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		1.500.000,00

4.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 442.100.000,00 dan Rp. 442.100.000,00 tidak mengalami kenaikan/Penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 4.33
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		442.100.000,00
2	Pertambahan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Jumlah Pertambahan		0,00
3	Pengurangan		
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Jumlah Pengurangan		0,00
4	Saldo Akhir		442.100.000,00

4.2.1.2.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 3.295.581.499,00 dan Rp. 3.163.378.509,00. Kabupaten Seruyan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus disusutkan perbulan. Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.34
Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan		Kenaikan/ Penurunan	%
		2024	2023		
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.746.170.292,00	2.677.826.100,00	68.344.192,00	0,98
3	Gedung dan Bangunan	250.379.207,00	230.719.909,00	19.659.298,00	0,92
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.032.000,00	254.832.500,00	44.199.500,00	0,85
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0	0
JUMLAH		3.295.581.499,00	3.163.378.509,00	132.202.990,00	0,96

4.2.1.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 914.250,00 dan Rp.0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 914.250,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.35
Rincian Aset Lainnya

No.	URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	URAIAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lain-Lain	437.870.690,00	180.506.250,00	257.364.440,00	142,58
6	Penyusutan Aset Lain Lain	(436.956.440,00)	(180.506.250,00)	(256.450.190,00)	(142,07)
7	Penyisihan TGR	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		914.250,00	0,00	914.250,00	(100,00)

4.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan aset dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.36
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		0,00
2	Pertambahan		
	Jumlah Pertambahan		-
3	Pengurangan		-
	Jumlah Pengurangan		-
4	Saldo Akhir		0,00

4.2.1.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

4.2.2 KEWAJIBAN

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 149.100,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 31.100,00 atau 26,36% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 118.000.

Tabel 4.37
Rincian Kewajiban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	149.100,00	118.000	31.100,00	26,36
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	149.100,00	118.000	31.100,00	26,36

Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 149.100,00 dan Rp. 118.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.38
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Utang Belanja	149.100,00	118.000,00	31.100,00	26,36
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	149.100,00	118.000,00	31.100,00	26,36

4.2.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

4.2.2.1.2. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.2.2.1.5. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 149.100,00 dan Rp. 118.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.39
Rincian Utang Belanja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
2	KEWAJIBAN	0,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	0,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	149.100,00
TOTAL		149.100,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
149.100,00	118.000,00

4.2.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan per 31 desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Rincian utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

1. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.215.162.645,00, sedangkan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.273.271.625,00. Terjadi penurunan sebesar Rp. 58.108.980,00. Rincian ekuitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.40
Ekuitas

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
3	EKUITAS	2.215.162.645,00	2.273.271.625,00
3.1	EKUITAS	2.215.162.645,00	2.273.271.625,00
3.1.01	Ekuitas	(6.860.766.835,00)	(3.928.714.954,00)
3.1.01.01	Ekuitas	2.294.550.195,00	2.370.037.811,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	2.294.550.195,00	2.370.037.811,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	2.294.550.195,00	2.370.037.811,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00)

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	9.075.929.480,00	6.201.986.579,00
3.1.03.01	RK PPKD	9.075.929.480,00	6.201.986.579,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	9.075.929.480,00	6.201.986.579,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.075.929.480,00	6.201.986.579,00
JUMLAH EKUITAS		2.215.162.645,00	2.273.271.625,00

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, LO menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 549.226.316,00 terdiri dari:

Tabel 4.41
Pendapatan - LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100)
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100)

4.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 549.226.316,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.42
Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)

4.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah -LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Sampai dengan 31 Desember 2024, saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.43
Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Pajak Hotel – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sampai dengan 31 Desember 2024, saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 549.226.316,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.44
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	549.226.316,00	(549.226.316,00)	(100,00)

4.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan Pendapatan dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 4.45
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dimana rincian pendapatan hibah tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.46
Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah-LO	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	100,00

4.3.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.47
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / Penurunan	%
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana JKN	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.2 Beban-LO

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Beban terdiri dari beban operasi dan beban penyusutan dan amortisasi. Realisasi dalam tahun 2024 sebesar Rp. 9.155.317.030,00 dan tahun 2023 sebesar Rp. 6.847.979.081,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.48
Beban -LO

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
8	BEBAN	9.155.317.030,00	6.847.979.081,00	2.307.337.949,00	33,69
8.1	BEBAN OPERASI	8.778.485.280,00	6.393.376.947,00	2.385.108.333,00	37,31
8.1.01	Beban Pegawai	3.065.548.777,00	2.653.188.195,00	412.360.582,00	15,54
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5.712.936.503,00	3.740.188.752,00	1.972.747.751,00	52,74
	JUMLAH BEBAN OPERASI	8.778.485.280,00	6.393.376.947,00	2.385.108.333,00	37,31
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	376.831.750,00	454.602.134,00	(77.770.384,00)	(17,11)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	312.972.952,00	390.743.336,00	(77.770.384,00)	(19,90)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.659.298,00	19.659.298,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	44.199.500,00	44.199.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	376.831.750,00	454.602.134,00	(77.770.384,00)	(17,11)
	JUMLAH BEBAN	9.155.317.030,00	6.847.979.081,00	2.307.337.949,00	33,69

4.3.2.10 Surplus/Defisit Operasional

Surplus/Defisit Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 00 dan Rp.0,00 Kenaikan/penurunan sebesar 0,00%.

4.3.3. Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.3.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.3.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.4. Pos Tak Terduga

Pos Tak Terduga terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.4.1 Pendapatan Tak Terduga

Pendapatan Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.4.2 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.4.3 Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

4.3.5. Surplus / Defisit LO

Surplus / Defisit LO 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (9.155.317.030,00) dan Rp. (6.298.752.765,00).

4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 2.273.271.625,00 dan Rp. 2.370.037.811,00

31 Desember 2024	31 Desember 2023
2.273.271.625,00	2.370.037.811,00

4.4.2 Surplus / (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (9.155.317.030,00) dan Rp. (6.298.752.765,00,00). Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(9.155.317.030,00)	(6.298.752.765,00,00)

4.4.3 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 2.215.162.645,00 dan Rp. 2.273.271.625,00

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Organisasi

5.1.1. Kedudukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Teknologi Informatika (TI), Telekomunikasi dan E- Government;
- e. Bidang Statistik;
- f. Bidang Persandian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
- e. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
- f. penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas;
- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;

- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
- h. melaksanakan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di Lingkup Pemerintah Daerah, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, menyediakan konten lintas sektoral, layanan kehumasan dan pemberitaan, pelayanan pers dan media penyiaran kebijakan pemerintah, dan mengelola media komunikasi publik di daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten;
- b. perumusan Kebijakan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten
- c. pelaksanaan rumusan Kebijakan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. pengoordinasian rumusan Kebijakan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Teknologi Informatika, Telekomunikasi dan E-Government

Bidang Teknologi Informatika Telekomunikasi dan E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bidang Teknologi Informatika. Telekomunikasi dan E-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi E-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informatika Telekomunikasi dan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten;
- b. perumusan kebijakan kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan Rumusan Kebijakan kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten;
- d. pengoordinasian Rumusan Kebijakan kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten dan Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

7. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, Pengembangan, pemeliharaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Statistik Sektoral Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
- b. perumusan Kebijakan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan Rumusan Kebijakan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
- d. pengoordinasian Rumusan Kebijakan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

8. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Bidang Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam rangka

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. perumusan Kebijakan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan Rumusan Kebijakan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. pengoordinasian Rumusan Kebijakan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan Evaluasi dan Peaporan kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

9. Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 4 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian (Ess Ila)

- 1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah tergambar dalam tabel 2.2.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	-	-
2	Golongan II	7	30,43
3	Golongan III	8	34,78
4	Golongan IV	6	26,08
5	Golongan IX	4	17,39
JUMLAH		23	100

2) Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 5.2

Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	S3	-	-
2	S2	5	21,7
3	S1	11	47,8
4	D1	-	-
5	D2	-	-
6	D3	3	13,8
7	SLTA	4	17,3
8	SLTP	-	-
9	SD	-	-
	JUMLAH	23	100

3) Keadaan Pegawai Menurut jenis kelamin

Tabel 5.3

Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	16	69,56
2	Perempuan	7	30,43
	JUMLAH	23	100

4) Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 5.4

Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan			Ket
			II	III	IV	
1	IIb	1	-	-	1	
2	IIIa	1	-	-	1	
3	IIIb	4	-	-	4	
4	Iva	2	-	2	-	
	JUMLAH	8	-	2	6	

5.5 Isu Strategis yang berpengaruh terhadap kinerja SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian pada dasarnya berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif mengoptimalkan penyebaran informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan dimana informasi yang disampaikan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik
2. Implementasi e-Government
3. Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Seruyan
4. Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebaran Informasi.

5.6 Indikator Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Kabupaten Seruyan dalam 5 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis dalam penyebaran informasi. Penyebarluasan informasi tidak saja melalui media yang ada disekitar kita namun juga melalui website sebagai pelayanan publik TIK yang terus menerus berkembang sesuai dengan arah kemajuan zaman. Tidak bisa dipungkiri pelayanan publik melalui TIK saat ini sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan TIK sehingga kemajuan suatu pemerintah daerah akan dituntut juga penggunaan TIK dalam kegiatan pada masing-masing OPD. Sejalan dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, maka komitmen yang dicapai sebagai indikator kinerja OPD meliputi penyebaran informasi dan jaringan komunikasi publik dan fasilitasi pelayanan publik melalui TIK. secara rinci seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.5

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPDMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 %	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPDMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPDMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.	Persentase cakupan layanan telekomunikasi (%)	43 %	45%	50%	100 %	100 %
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	100 %	60%	60%	60 %	60 %
4.	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Buku Kabupaten dalam angka	0 %	100%	100%	100%	100%
5	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100 %	100 %	100%	100%	100%

5.7 Program/Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian merupakan SKPD yang terkait dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - a. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Mebel
- f. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - a. KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 2. Pelayanan Informasi Publik
 3. Monitorin Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
 4. Pengelolaan media komunikasi publik
 5. Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
 6. Penyusunan Konten
3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - a. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
 - b. PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Kordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
 2. Koordinasi Penyusunan proses Bisnis
 3. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
 4. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 5. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
 6. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Darah
 7. Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 8. Koordinasi dan Fasilitasi Pemyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
 9. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah atau Kota Cerdas

10. Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 - a. PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
 - a. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 3. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b. PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas;
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan dan sekaligus sebagai bahan untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian selama tahun anggaran 2024 ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan di SKPD, masih perlu dilakukan peningkatan dalam perencanaan pendapatan dan belanja SKPD untuk optimalisasi pendapatan dan belanja SKPD dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Seruyan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan untuk mewujudkan Seruyan SEHAT.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 13 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika statistik
dan Persandian,


dr. H. RESON RUSDIANTO, M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19770222 200604 1 012

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

Mengotahui
KEPALA DISKOMINFOSANDI

Dr. H. WESNI RUSDIANTO, M.A.P.
NIP. 14770122 200604 1 012

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


MAWARTI NINGSIH, S.A.P.
NIP. 19720919 201001 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI BELANJA HIBAH BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

No	Kode Rekening	Nama/ Kelompok Penerima	Alamat Penerima	Barang yang diterima	Jumlah yang diterima			Nomor NPHD	Nomor BAST	SKPD
					Volume	Harga	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		NIHL								
		JUMLAH								

Kuala Pembuang. Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

MAWARTI NINGSIH, S.A.
NIP. 19720919 201001 2 00



SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Mengetahui
Kepala Diskominfosandi



Dr. H. RISHAN RUSLIANTO, M.P.
NIP. 39770222006041012

EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
NIP. 19910326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

[illegible]

Kuala Penbuang, Januari 2025

Pejabat Perusahaan Keuangan,

EKO PURNANTO, S.Kom., M.M.
NIP. 19910326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	Kode Rekening	Wajib Pajak/Retribusi	Tanggal Membayar	Tanggal Ketetapan		Jumlah Yang dibayar	Nilai PAD per Hari	PAD per 31 Desember 2022		Pendapatan Diterima di Muka		SKPD
				Masa Berlaku	Total Hari			Jumlah Hari	Nilai PAD	Sisa Hari	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=9x8	11=6-9	12=11x8	13
				NIHIL								
Jumlah												



Kuala Pembuang, Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
NIP. 19810326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI UTANG
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Rekening Utang	Uraian Utang	Debitur	Saldo Awal Utang per 01 Januari 2024	Penambahan Utang	Pengurangan Utang	Saldo Akhir Utang s.d per 31 Desember 2024	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Belanja Air ub Desember 2023		Rp118,674,00	Rp0,00	Rp118,674,00	Rp0,00	DISKOMINFOSANDI
		Belanja Air ub Desember 2024		0	150100	0	150100	
JUMLAH							Rp150.100,00	



Kuala Pembuang, Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
NIP. 19910326 201903 1 003

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

[illegible]

Kuala Pambuang, Januari 2025

Pejabat Perusahaan Keuangan,

EKO PURWANTO, S.Kem., M.M.
NIP. 19910326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DAFTAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Rekening	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Nomor / Tanggal STS	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		NIHIL						
JUMLAH								



Mengetahui
 Kepala DISKOMINFO SAKDI

dr. H. RESNAN RUSDIANTO, M.A.P.
 NIP. 19730222 200604 1 012

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
 NIP. 19910326 201903 1 003

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode Rekening	Nama/ Kelompok Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Uang yang diterima	Nomor NPHD	Nomor BAST	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
		NILAI					
		JUMLAH					



EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
NIP. 19910326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI BELANJA HIBAH UANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)

No	Kode Rekening	Nama/ Kelompok Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Uang yang diterima	Nomor NPHD	Nomor BAST	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
		NIHIL					
JUMLAH							



Kuala Pembuang, Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
 NIP. 19910326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN KAS
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	KODE REKENING KAS	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	SALDO AWAL BANK PER 01 JAN 2023	SALDO AKHIR BANK PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN REKENING	SKPD
1	1.1.01.03.01.0001-Kas di Bendahara Pengeluaran	Bank Keleng	Bendahara Diskominfo dan Statistik Kab. Seruyan	3.010.102.001.136	0,00	0	Rkening Giro Bendahara Pengeluaran	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		JUMLAH			-	-		

1.1.01.03



Kuala Pamhuan, Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan,


EKO PURWANTO, S.Kom., M.M.
NIP. 19910326 201903 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam Rupiah)										
No	Kode Rekening	Nama/ Kelompok Penerima	Alamat Penerima	Barang yang diterima	Jumlah yang diterima			Nomor NPHD	Nomor BAST	SKPD
					Volume	Harga	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		NIHIL								
JUMLAH										



Mengetahui
Kepala DISKOMINFOSANDI
Dr. H. RESMI RUSDIANTO, M.A.P.
NIP. 98770222 200604 1 012

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


MAWARTI NINGRAT, S.A.P.
NIP. 19720919 201001 2 001